

EDITORIAL

Jurnal TINGKAP Volume X No. 2 bulan Oktober 2014 ini menyajikan 6 artikel, yaitu 5 artikel hasil penelitian, 1 artikel konseptual, dan 1 Resensi buku. Tulisan-tulisan tersebut terangkum dalam satu tema: *Organisasi Publik: Sejarah, Kebijakan, dan Pengelolaannya*, dan meliputi berbagai topik, yaitu: *Pemetaan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh Tahun 2013* (Aryadie Adnan); *Citizen Satisfaction With Local Governance Service: Influencing Manager Roles toward Increasing Public Service on Local Government* (Dasman Lanin); *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Study Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970* (Erma); *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto* (Jumiati); *Sentralisme dan Perlawanan Daerah: Dialektika Perjalanan Sejarah Bangsa Paskakolonial (1945-2005)* (Mestika Zed); dan *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang* (Nora Eka Putri). Selain itu Jurnal edisi ini juga dilengkapi dengan sebuah resensi buku *Melawan Lupa terhadap Tan Malaka* (Mestika Zed).

Pada tulisan pertama dalam edisi ini **Aryadie Adnan** mengemukakan hasil penelitiannya tentang Pemetaan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh Tahun 2013. Menurut Aryadie, implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain: 1) Masih banyak sekolah di Kota Payakumbuh yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada tingkat Pendidikan Dasar; 2) Belum adanya pemetaan terhadap sekolah mengenai penerapan Standar Pendidikan Nasional, sehingga belum ada stratifikasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan; 3) Masih rendahnya mutu pelayanan pendidikan di sebagian Sekolah Dasar di Kota Payakumbuh; dan 4) Tindak lanjut pelaksanaan Standar Pendidikan Nasional belum terkoordinir dari penyelenggara pendidikan pada berbagai tingkatan. Temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa capaian kondisi Standar Nasional Pendidikan dari 66 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Payakumbuh cukup beragam, mulai dari berkategori sangat baik sampai berkategori sangat kurang. Namun ada kecenderungan bahwa kategorinya lebih banyak dalam kategori baik, sedang, dan kurang, bahkan ada yang berkategori sangat kurang, kecuali dalam hal sistem penilaian yang ada berkategori sangat baik. Dari beberapa kesimpulan hasil studi ini Aryadie Adnan menyarankan beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam perbaikan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, seperti pentingnya melahirkan kebijakan Perencanaan Pembangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan yang ideal; perlunya dilakukan survei terhadap beberapa sekolah yang capaian Standar Nasional Pendidikannya Kurang dan Sangat Kurang, guna merencanakan program kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan capaian pada tahun-tahun berikutnya; perlunya memperjuangkan alokasi dana untuk kegiatan peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan melalui TPAD, DPRD, mulai dari

Musrenbang, penetapan KUA PPAS sampai pada Penetapan RKA dan DPA; dan menghindari agar pembangunan bidang pendidikan tidak dijadikan komoditas politik.

Selanjutnya pada tulisan kedua **Dasman Lanin** menyajikan hasil pemikiran konseptualnya tentang *Citizen Satisfaction With Local Governance Service: Influencing Manager Roles toward Increasing Public Service on Local Government*. Menurut Dasman Lanin, pemerintahan lokal di Indonesia saat ini sedang mengalami disorientasi pelayanan publik, disamping juga mengalami ketidakstabilan manajemen pemerintahan lokal. Kemudian ditambah dengan terbatasnya sumber daya (alam dan manusia) yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan desentralisasi. Semuanya memerlukan kerja keras dan peranan kepala pemerintah daerah yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam menaggulangi keadaan di atas diperlukan reorientasi fungsi dan peranan menejer sehingga pelayanan publik pada pemerintahan lokal dapat tersedia dengan memuaskan. Berdasarkan latar belakang di atas, Dasman Lanin telah melakukan penelitian dan merumuskan masalah tentang bagaimana pengaruh peranan luar yang dimainkan menejer pemerintahan lokal terhadap kepuasan warga pada pemerintahan local? Apakah dengan meningkatkan berbagai peranan menejer akan dapat pula meningkatkan kepuasan warga dalam pelayanan publik pemerintahan lokal? Dan serapa besar kontribusi peranan menejer terhadap kepuasan warga yang menerima layanan pemeritahan local tersebut di kota Padang? Setelah melakukan penelitiannya akhirnya Dasman Lanin sampai pada suatu kesimpulan bahwa pengaruh peranan yang dimainkan menejer pemerintahan lokal terhadap kepuasan warga di pemerintahan lokal terbukti signifikan. Akibatnya, dengan meningkatkan berbagai peranan menejer akan dapat pula meningkatkan kepuasan warga dalam pelayanan publik pemerintahan lokal. Besar kontribusi peranan menejer tersebut terhadap kepuasan warga yang menerima layanan pemeritahan local tersebut di kota Padang ditemukan sebesar 7,9%. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan penelitiannya tersebut Dasman Lanin juga menyarankan antara lain: 1) bagi peneliti berikutnya dan bagi yang ingin menguji lebih lanjut dan mengembangkan pelayanan publik dengan model ini, dengan pertimbangan konteks pemerintahan yang berbeda dengan karakteristik lokasi penelitian ini, dan juga dengan pertimbangan konteks nilai budaya yang berbeda dengan lokus penelitian ini, juga dianjurkan untuk menggunakan model ini. Supaya model ini dapat meningkatkan kehandalannya sebagai sebuah model yang memiliki nilai konstruksi yang universal; dan 2) bagi praktisi manajemen pelayanan publik, model ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan profesionalisme dan meminimalisir politik internal organisasi dalam birokrasinya, supaya warga semakin puas dan semakin percaya kepada pemerintah kotanya. Disamping itu, juga disarankan kepada tenaga yang terlibat dalam penyedia pelayan publik untuk lebih meningkatkan keprofesionalannya, dan menghindarkan diri dari kepemihakan pada klik, kelompok tertentu dan tekan partai politik dalam unit kerja birokrasinya.

Pada tulisan ketiga dalam edisi ini **Erma** menyampaikan pula hasil penelitiannya tentang sejarah Bank Indonesia dengan judul tulisan *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Study Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970*. Menurut Erma, Sistem perbankan di Indonesia berawal dari tradisi lembaga keuangan Belanda di Amsterdam yang mulai berkembang pada paruh kedua abad XIX. Salah satu di antaranya adalah *De Javasche Bank* yang didirikan tahun 1828. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Erma, *de Javasche Bank* mengembangkan usahanya ke luar Pulau Jawa yaitu Sumatera Barat (Padang). Pendirian *De Javasche Bank* Cabang Padang tidak terlepas dari Sistem Tanam Paksa kopi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial yang dimuat dalam salinan Surat Keputusan Gubernur Micheals tanggal 1 November 1847. Dalam artikelnya ini Erma hanya membatasi pembahasan tentang perubahan apa sajakah yang terjadi sebelum *De Javasche Bank* dinasionalisasikan dan setelah menjadi Bank Indonesia dan bagaimana hubungan antara Bank Indonesia Pusat dengan Bank Indonesia Cabang Padang. Menurut Erma pula, dalam perkembangan *De Javasche Bank* 1828-1970 telah mengalami perubahan. *De Javasche Bank* berkembang secara bertahap. *Pertama* tahun 1828 *De Javasche Bank* menjadi Bank sirkulasi diberi hak monopoli dalam pengeluaran uang kertas bank berdasarkan oktroi pertama yang berlaku tanggal 1 Januari 1827 sampai 31 Desember 1837. *Kedua*, tahun 1829. *De Javasche Bank* membuka dua buah Kantor Cabang *De Javasche Bank* di Pulau Jawa, yaitu Kantor Cabang *De Javasche Bank* di Semarang tanggal tanggal 1 Maret 1829 dan di Surabaya didirikan pada tanggal 14 September 1829 yang dipimpin oleh F. H. Preyer sampai tahun 1868 berfungsi sebagai Bank Sirkulasi. *Ketiga*, masa sistem tanam paksa 1830-1870, pada masa ini terjadi beberapa peristiwa penting diantaranya: a) Semua ekspor komoditas pertanian dimonopoli oleh pemerintah yang mengakibatkan *De Javasche Bank* mengalami kerugian, karena tidak dapat melayani per-tukaran uang kertas, emas, dan perak; b) *De Javasche Bank* membuka kantor cabang di luar Pulau Jawa diantaranya di Padang tahun 1864; c) tahun 1868 *De Javasche Bank* ditetapkan sebagai kasir pemerintah di Hindia Belanda dan terjadi perubahan fungsi *De Javasche Bank* dari bank sirkulasi menjadi bank Sentral yaitu bank diberi wewenang untuk memberikan uang muka dalam jangka waktu pendek. *Keempat*, masa pendudukan Jepang 1942-1945, pada masa ini terjadi pengambilalihan semua bank milik Belanda oleh rezim Jepang serta penggunaan mata uang Jepang. *Kelima*, masa kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1953. Pada masa ini terjadi kekacauan dalam sistem keuangan dan perbankan. Untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan ORI dan mendirikan BNI sebagai bank sentral bersamaan dengan beroperasinya kembali *De Javasche Bank* tahun 1946, selama lebih kurang empat tahun tidak berfungsi. Pada masa Orde Lama, penggabungan bank pemerintah menjadi bank tunggal yang terdiri dari beberapa unit dalam menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan rencana karena peraturannya tidak jelas. Pada masa Orde Baru, untuk mengatasi masalah kekacauan keuangan dan perbankan, pemerintah menghapuskan sistem bank tunggal dan menjadikan Bank Indonesia menjadi Bank Sentral dan berfungsi sebagai agen pembangunan dan bank sirkulasi serta mengelompokkan bank-bank yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitiannya ini, Erma

antara lain menyarankan bagi peneliti lanjutan agar melakukan penelitian dengan aspek temporal yang diperluas. Disamping itu disarankan agar menggunakan sumber-sumber arsip, karena itulah kelemahan dari penelitian ini tidak banyak menggunakan arsip tetapi lebih banyak menggunakan sumber sekunder dan Koran sezaman. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini supaya dimasukkan sebagai salah satu khasanah sejarah kelembagaan, karena merupakan peninggalan sejarah kolonial abad ke 19 yang masih tersisa. Disamping itu Erma juga mengharapkan agar Dinas Pendidikan bidang kajian sejarah kelembagaan, memperkenalkan pada generasi muda Kota Padang bahwa telah hadir di kota ini lembaga perbankan pada abad ke 19.

Pada tulisan keempat dalam edisi ini **Jumiati** menyajikan pula hasil penelitiannya tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto*. Menurut Jumiati, sejak digulirkannya otonomi daerah kontribusi perempuan seyogyanya dapat diakomodasi dengan baik terutama dalam pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah), semestinya memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting di setiap daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat adalah sektor ekonomi kerakyatan terutama yang bergerak di industri rumah tangga seperti kerajinan tenun dan keterampilan tradisional lainnya. Kerajinan tenun, menurut Jumiati, memiliki prospek cerah dalam dunia industri baik industri lokal maupun secara global. Kerajinan tenun merupakan salah satu identitas daerah atau suku bangsa atau dalam skala yang lebih besar adalah potensi budaya yang dapat dipromo-sikan secara internasional apalagi dalam era perdagangan bebas saat ini. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, potensi tersebut harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya harus ditingkatkan sehingga secara ekonomi kerajinan tersebut juga memiliki daya saing tinggi. Di sisi lain, pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggung-jawab semua masyarakat termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut. Meskipun pengelolaan kerajinan tenun Silungkang belum diatur dalam regulasi, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap memberikan bantuan kepada pengrajin tenun Silungkang dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Petausahaan, Per-tanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kemudian Pemerintah Kota Sawahlunto juga menggalakkan *kampong tenun* dan *kampong wisata* dalam rangka promosi tenun Silungkang dan lebih luas lagi dengan mengikuti event-event seperti *Sawahlunto Expo*, *Padang Fair* dan *Jakarta Fair* sehingga semua orang akhirnya mengetahui keberadaan dan potensi tenun Silungkang. Di antara perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tidak luput dari kelemahan misalnya pengawasan tentang bantuan yang diberikan apakah bermanfaat bagi masyarakat kemudian juga belum adanya upaya untuk mengangkat tenun Silungkang menjadi suatu komoditas barang perekonomian yang menjanjikan bagi perkembangan PAD Kota Sawahlunto ke depan misalnya melalui hak paten Tenun Silungkang dan lain sebagainya. Pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum ditemukan Peraturan daerah atau regulasi lain yang terkait dengan gender. Berdasarkan hasilpenelitiannya di Kota Sawahlunto, Jumiati berkesimpulan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi dalam upaya pencapaian kehidupan dan pembangunan masyarakat lebih baik. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah sudah membuat regulasi dan melakukan program atau kegiatan pemerintahan yang responsive gender. Pemerintah daerah sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan masyarakat di daerah harusnya peka dengan persamaan dan keadilan masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang. Kerajinan tenun Silungkang meskipun sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Silungkang khususnya perempuan bukan berarti dalam pengelolaannya tidak memerlukan kebijakan pro gender sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto harus melahirkan regulasi yang berbasis gender termasuk dalam pengelolaan tenun Silungkang. Selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto juga memperhatikan instruksi atau aturan yang lebih tinggi agar diterapkan di daerahnya sebab semua itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di daerah.

Pada bagian kelima edisi ini **Mestika Zed** mencoba pula menganalisis beberapa hal berkenaan dengan *Sentralisme dan Perlawanan Daerah: Dialektika Perjalanan Sejarah Bangsa Paskakolonial (1945-2005)*. Menurut Mestika, sejarah Indonesia modern sejak proklamasi 1945 sampai sekarang merupakan sejarah transisi yang tersandung-sandung dari satu rejim ke rejim lain, dari suatu sistem ke sistem lain dan seringkali sangat rentan terhadap perpecahan. Tiap kali terjadi pergantian kekuasaan, bangsa ini hampir selalu berhadapan dengan situasi krisis, goncangan kekerasan, dan perpecahan, meskipun sesudah itu selalu ada upaya untuk merajut kembali keutuhan seperti sedia kala. Sewaktu memberikan reaksinya terhadap situasi krisis ini, para pemimpin yang berada di pusaran kekuasaan seringkali berpaling kepada sejarah dan budaya bangsa, karena hanya dengan itulah identitas bersama dapat dipupuk kembali guna membantu melindungi ras solidaritas bersama dari ancaman disintegrasi. Sejak itu, harapan demi harapan pun digulirkan kembali, biasanya dengan menawarkan format politik baru sebagai anti-tesis terhadap rejim sebelumnya, tetapi kemudian dalam perjalanannya jarum bandul kembali bergeser ke arah yang tadinya ditolak. Dalam situasi semacam itu, Indonesia kelihatan tak kunjung mampu keluar dari lingkaran

semula karena terperangkap ke dalam apa yang oleh antropolog Clifford Geertz disebut *state-manque*, yaitu suatu keadaan di mana negara berputar-putar pada dilemma yang sama tanpa benar-benar menemukan titik *telos* yang ingin dicapai sebagaimana yang didambakan oleh *the founding fathers* sebelumnya. Dalam tulisannya ini Mestika berupaya meninjau kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tema pokok dari makalah ini ialah tentang hubungan antara negara dan masyarakat (*state-society relationship*) selama lebih enam puluh tahun Indonesia merdeka, khususnya berkenaan dengan kega-galan rejim-rejim sipil dan militer mensintesis sejarah bangsa, sehingga pada gilirannya menimbulkan perbenturan politik, militer dan ekonomi antara pusat dan daerah. Makalah ini ingin menjelaskan gerigi-gerigi tajam yang menimbulkan percekocokan antara pusat dan daerah, khususnya berkenaan bentuk-bentuk dominasi pusat yang dilembagakan Jakarta untuk menciptakan dan mempertahankan subordinasi daerah dan reaksi daerah terhadap dominasi pusat. Kesimpulannya, menurut Mestika, secara politik, militer, dan ekonomi, perbenturan pusat daerah lebih cenderung berasal dari kebijakan pusat yang menindas dan kurang berkeadilan. Orde Baru memberlakukan ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat dengan membangun hubungan-hubungan kekuasaan dan ekonomi via jaringan primordial. Berbeda dengan tahun 1950-an, sumber ekonomi dan militer di zaman Orde Baru tidak langsung diawasi daerah. Orde Baru mengorganisasi Indonesia ke dalam daerah-daerah yang secara hukum “administratif” dan “otonom” pada waktu yang ber-samaan, dan menggunakan ambiguitas ini untuk memperlakukan mereka dalam praktek sebagai perluasan administratif kekuasaan pusat, sama seperti pada zaman Belanda. Ironinya cukup jelas. Karena secara historis disahkan sebagai suatu reaksi nasionalis terhadap usaha Belanda untuk memaksakan federalisme yang bersifat memecah dan mepemerintah di nusantara menyusul Perang Dunai II, Orde Baru yang sangat mendukung kesatuan semakin mirip dengan contoh kolonial sebelumnya.

Akhirnya pada tulisan terakhir (keenam) dalam edisi ini **Nora Eka Putri** menyajikan hasil penelitiannya tentang Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang. Menurut Nora, penerapan desentralisasi dalam bidang kesehatan memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi kesehatan, dalam hal ini pelayanan kesehatan di daerah, harus dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Namun, menurut Nora, fenomena yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan namun juga merambah hingga pedesaan sehingga terdapat anekdot dalam masyarakat bahwa “orang miskin dilarang sakit”. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit

tergolong berat tidak dapat disembuhkan karena ketiadaan biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali sehingga pada akhirnya penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah sumber daya manusia yang relatif rendah yang menyebabkan keterbatasan informasi, misalnya tentang aturan hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan medis agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pelayanan dari tenaga medis yang tidak menyenangkan, malpraktik, dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang di atas Nora telah melakukan suatu penelitian untuk mengungkapkan bagaimana perbedaan efektivitas penerapan Jamkesmas-Jamkesda dengan JKN-BPJS dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Padang. Pada akhir penelitiannya Nora sampai pada suatu kesimpulan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga miskin. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS terhadap warga miskin dimasukkan ke dalam kategori kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Efektivitas JKN melalui BPJS dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu kualitas, penilaian oleh pihak luar, kesiagaan, motivasi, keluwesan adaptasi, penerimaan tujuan organisasi. Dari beberapa indikator tersebut diketahui bahwa BPJS sebagai penyelenggara JKN cukup melakukan tanggungjawab kerja dengan baik sebab hasil penelitian dengan menggunakan kuisioner menunjukkan bahwa responden cukup memahami penggunaan JKN setelah mendapatkan penjelasan di kantor BPJS hal ini juga dibuktikan melalui data statistik yaitu terdapat hubungan yang sangat signifikan antara efektivitas penerapan JKN melalui BPJS dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh responden peserta PBI cukup baik artinya masih terdapat kelemahan di dalam implementasinya misalnya pelayanan di Puskesmas tertentu cenderung berbelit-belit dan kurang ramah terutama kepada pasien peserta BPJS PBI sehingga masyarakat miskin merasa diabaikan oleh pemerintah, padahal di dalam peraturan perundangan dikatakan bahwa JKN melalui BPJS kesehatan berhak dirasakan oleh seluruh warga Indonesia tanpa ada tindakan diskriminatif dan lainnya. Berdasarkan kesimpulan penelitiannya itu Nora antara lain menyarankan bahwa dalam penerapan JKN melalui BPJS kesehatan harus dilakukan perbaikan terus menerus terutama sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat terutama warga miskin agar mereka merasakan kepedulian pemerintah kepada mereka, kemudian penyelenggara di tempat fasilitas kesehatan harus menyadari peran dan tanggungjawab dengan baik sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar dan selanjutnya kenyamanan pelayanan juga akan dirasakan oleh warga miskin terutama di Puskesmas-puskesmas dan RS pemerintah.

Tulisan-tulisan yang disajikan dalam edisi Volume IX Nomor 2 Oktober 2013 ini sangat baik dibaca dan dipahami terutama bagi mereka yang ingin mendalami berbagai persoalan yang menyangkut berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan sejarah, politik, dan komunikasi, sesuai dengan tema edisi ini. Akhirnya redaksi mengucapkan terima kasih kepada

para penulis dan selamat menikmati tulisan ini bagi para pembaca semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi para pembaca sekalian.

Selamat membaca...!

Syamsir
Ketua Penyunting